

## IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DAN KETIMPANGAN ANTARKABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Restiatun

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat  
Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin Telepon/Fax: (0511) 330 5116,  
E-mail: restiatun@yahoo.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di setiap kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, analisis disparitas antara kabupaten juga dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Location Quotient, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan Indeks Entropi Theil. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan disparitas ini meningkat dari waktu ke waktu, kota Yogyakarta dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh, sedangkan kabupaten Bantul dan Kulon Progo, termasuk dalam klasifikasi daerah yang relatif terpencil. Provinsi DIY terjadi ketidakseimbangan tren naik. Rasio dihitung dari pendapatan per kapita tertinggi dan terendah di wilayah Provinsi DIY menunjukkan tren perbaikan.

**Kata kunci:** disparitas, Location Quotient, Tipologi Klassen, Indeks Williamson

**Abstract:** This study aims to identify the leading sectors in each district/city in the province of Yogyakarta Special Region. In addition, analysis of the disparities between districts was also discussed in this study. This study using Location Quotient approach, Typology Klassen, Williamson index and Theil Entropy Index. The results showed that there is a tendency that this disparity increased over time, the city of Yogyakarta in the regional classification fast forward and fast growing, whereas the districts of Bantul and Kulon Progo, including in relatively remote areas classification. DIY Province rising trend imbalances occur. The calculated ratio of the highest per capita income and lowest regions in the Province of DIY shows the trend of improvement.

**Keywords:** disparity, Location Quotient, Typologi Klassen, Williamson index

### PENDAHULUAN

Adanya realitas kesenjangan regional dan distribusi spasial atas sumber daya merupakan dampak dari proses pembangunan yang tidak merata. Pembangunan sarana dan prasarana umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa ketimpangan antardaerah erat kaitannya dengan ketimpangan penyebaran penduduk.

Daerah-daerah yang padat penduduk dan dengan sarana/prasarana yang memadai akan menjadi pusat kegiatan ekonomi, akibatnya penyebaran kegiatan ekonomi menjadi tidak merata dan berdampak pada kesenjangan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan antardaerah. Perbedaan laju pertumbuhan antardaerah ini akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antardaerah.

Premis dari agenda pertumbuhan adalah

bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, melindungi lingkungan dan memperkuat tatanan sipil. Premis ini menjadi sangat ironis karena di banyak negara pertumbuhan ekonomi tetap saja menyimpan persoalan yang krusial yang meliputi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan baik secara sosial maupun ekonomi. Ketimpangan yang sering terjadi secara sosial ataupun ekonomi ini akan menciptakan kelompok-kelompok penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumberdaya-sumberdaya pembangunan.

Model pertumbuhan Harrod-Domar yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Neoklasik berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dari kenaikan *output* nasional merupakan indikator adanya kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja baru karena adanya tambahan atau perluasan investasi serta adanya efek penetesan ke bawah (*trickle down*). Walaupun terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan, namun lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa faktor utama dalam penentuan distribusi pendapatan adalah struktur ekonomi dan bukan tingkat atau laju pertumbuhan ekonomi.

Banyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi tetapi kemiskinan belum bisa dihilangkan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dicapai dengan penerapan teknologi padat modal atau pertumbuhan tersebut dihasilkan oleh aktivitas investasi sejumlah kecil investor atau pemilik modal atau konglomerat.

Terjadinya pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta sangat diperlukan dalam proses pembangunan daerah. Kemitraan seperti ini akan berdampak positif terhadap pengelolaan sumberdaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sehingga akan tercipta lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi serta pada gilirannya akan terjadi pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Keberhasilan proses pembangunan dapat dilihat dari beberapa tolok ukur, antara lain pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi serta semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor. Tetapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan.

Pembangunan tidak selalu berjalan secara sistemik. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat, sedangkan daerah lain mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Pertumbuhan yang tidak merata dan distribusi pendapatan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi mayoritas pembangunan daerah di Indonesia saat ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya kecenderungan peranan modal yang lebih memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan (transportasi), telekomunikasi, jaringan listrik, dan lain-lain.

Untuk dapat tumbuh dengan cepat, suatu daerah perlu memiliki satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat. Apabila daerah ini kuat maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi daerah-daerah lemah. Pertumbuhan ini akan berdampak positif bagi daerah-daerah di sekitarnya. Diharapkan pertumbuhan yang cepat di pusat pertumbuhan dapat menetes ke bawah (*trickle down effect*), yaitu adanya pertumbuhan di daerah yang

kuat akan menyerap potensi kerja atau mungkin daerah yang lemah dapat menghasilkan produk yang sifatnya komplementer dengan produk yang dihasilkan daerah kuat. Selain itu, perlu juga ditentukan hubungan pusat dan daerah yang memiliki potensi paling kuat sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi di daerah lain yang lemah (Wiyadi, 2003).

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat kabupaten, yaitu kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Kulon Progo dan kabupaten Gunung Kidul

serta satu kota, yakni kota Yogyakarta. Dari kelima kabupaten kota tersebut, kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten paling miskin, karena memiliki pendapatan daerah yang sangat kecil dibandingkan keempat kabupaten/kota lainnya.

Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 menyajikan data seluruh kabupaten/kota di provinsi DIY terkena dampak krisis ekonomi, tetapi dampak terbesar dan terlama dialami oleh kabupaten Kulon Progo, karena ketika pertumbuhan seluruh kabupaten/kota negatif pada tahun 1998, kabupaten Kulon progo mengalami pertumbuhan negatif terbesar. Tahun 1999, kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, dan kabupaten Gunung Kidul mulai terjadi *recovery* ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi mulai positif, kabupaten Kulon Progo masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar -10%. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat pembangunan di kabupaten Kulon Progo. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhir-

**Tabel 1. PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Kabupaten/kota di Provinsi DIY Tahun 1993-2003 (Juta Rupiah)**

kab/kota tahun	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Bantul	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Gunung Kidul
1993	1,138,284	1,139,135	701,852	399,454	750,904
1994	1,227,679	1,235,258	757,813	408,785	807,057
1995	1,358,904	1,336,030	812,682	415,042	865,434
1996	1,479,654	1,446,210	867,199	436,330	925,738
1997	1,550,159	1,497,330	893,352	447,571	960,495
1998	1,378,655	1,372,071	809,932	384,783	890,348
1999	1,393,312	1,398,538	820,611	346,061	905,619
2000	1,443,185	1,449,351	845,718	352,854	930,497
2001	1,489,258	1,507,369	871,970	360,577	950,887
2002	1,540,801	1,578,866	903,932	369,546	968,908
2003	1,602,184	1,654,682	943,757	381,842	989,017

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto, BPS, beberapa edisi

**Tabel 2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi DIY (dalam %)**

Kab/kota	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Yogyakarta	7.85	10.69	8.89	4.76	-11.06	1.06	3.58	3.19	3.46	3.98
Sleman	8.44	8.16	8.25	3.53	-8.37	1.93	3.63	4.00	4.74	4.80
Bantul	7.97	7.24	6.71	3.02	-9.34	1.32	3.06	3.10	3.67	4.41
Kulonprogo	2.34	1.53	5.13	2.58	-14.03	-10.06	1.96	2.19	2.49	3.33
Gunung Kidul	7.48	7.23	6.99	3.75	-7.30	1.72	2.75	2.19	1.90	2.08

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto, BPS, beberapa edisi, diolah.

**Tabel 3. PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Kabupaten/kota di Provinsi DIY Tahun 1993-2003**

kab/kota tahun	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Bantul	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Gunung Kidul
1993	2787268	1402016	975433	1073464	1143545
1994	3017456	1497636	1040780	1098864	1225207
1995	3352703	1595721	1103023	1116067	1309777
1996	3664696	1701712	1163243	1173776	1396788
1997	3854305	1735830	1184360	1204550	1444903
1998	3441432	1567191	1061305	1036076	1335443
1999	3491939	1573971	1062872	932315	1354421
2000	3631586	1607291	1082784	951179	1387675
2001	3762891	1647252	1103600	972619	1414122
2002	3909273	1700303	1130995	997494	1436968
2003	4082081	1756132	1167405	1031442	1462837

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto, BPS, beberapa edisi

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi DIY (dalam %)**

Kab/kota	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Yogyakarta	8.26	11.11	9.36	5.17	-10.71	1.47	4.00	3.62	3.89	4.42
Sleman	6.82	6.55	6.64	2.00	-9.72	0.43	2.12	2.49	3.22	3.28
Bantul	6.70	5.98	5.46	1.82	-10.39	0.15	1.87	1.92	2.48	3.22
Kulonprogo	2.37	1.57	5.17	2.62	-13.99	-10.01	2.02	2.25	2.56	3.40
Gunung Kidul	7.14	6.90	6.64	3.44	-7.58	1.42	2.46	1.91	1.62	1.80

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto, BPS, beberapa edisi, diolah.

nya akan menyebabkan ketimpangan regional yang semakin besar.

Pola pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh visi dan misi dari masing-masing daerah. Adapun visi dan misi dari provinsi DIY dan kelima kabupaten/kotanya sebagai berikut:

**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**  
**Visi Pembangunan Daerah:** "Terwujudnya pembangunan regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya dan Daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkungan masyarakat

yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan.”

Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkan visi tersebut, antara lain: (1) Terbentuk citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Tersedianya lapangan kerja yang memberikan penghasilan yang cukup bagi masyarakat secara adil dan merata, (3) Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, sehingga sumber daya manusia yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global, (4) Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan, dengan mengembangkan kerukunan hidup antarkomponen masyarakat, baik antara agama, suku dan budaya, (5) Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan, dan (6) Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah.

**Misi Pembangunan Daerah:** Berdasarkan visi pembangunan serta kondisi daerah yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap seperti tersebut di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut: (1) Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Indo-

nesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi, (2) Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pusat Budaya, dan bertaqwa (IMTAQ), serta mampu memilih dan menyerap Budaya Modern yang positif dan tetap melestarikan Budaya Daerah, (3) Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan, dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, (4) Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan yang terpadu, komplementatif dan sinergi antarwilayah dan antarsektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan sosial budaya dan ketahanan sumberdaya yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (5) Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata MICE (*Meeting Incentive, Conference and exhibition*) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa. (6) Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Wilayah pengembangan Industri sedang dan kecil *non-pollutan* serta industri rumah tangga modern yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan seni daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global, (7) Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah

pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan global dengan produk Agrobisnis dan Agro-industri yang kompetitif.

**Kota Yogyakarta. Visi Pembangunan Daerah:** "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana"

**Misi Kota Yogyakarta:** (1) Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas, (2) Menjadikan dan mewujudkan pariwisata, seni dan budaya sebagai unggulan daerah dalam rangka mengembangkan kota sebagai kota pariwisata yang berbudaya, (3) Menjadikan dan mewujudkan kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, (4) Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki/handarbani, dan (5) Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan.

**Kabupaten Sleman. Visi Pembangunan Daerah:** "Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah

dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya."

**Misi Pembangunan Daerah:** (1) Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik Misi ini merupakan upaya Pemerintah kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Misi ini menjiwai implementasi misi-misi yang lain. (2) Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat. Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan, (3) Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, dan relevansi mutu pelayanan dasar.

**Kabupaten Bantul. Visi Pembangunan Daerah:** "Mewujudkan Peningkatan Pelaya-

nan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Daerah di kabupaten Bantul.”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bantul, Dinas Pekerjaan Umum harus melaksanakan program pembangunan Prasarana dan Sarana di bidang Bina Marga dan Cipta Karya secara berkesinambungan sesuai dengan perencanaan strategis selama 5 tahun (Tahun 2006 s/d 2010).

**Misi Pembangunan Daerah:** (1) Meningkatkan pelayanan di sektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di kabupaten Bantul, (2) Meningkatkan pelayanan di sektor Perumahan dan Permukiman serta pengembangan wilayah secara terpadu di kabupaten Bantul, dan (3) Mendukung peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor Kesehatan, Pendidikan, Perdagangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah di kabupaten Bantul.

**Kabupaten Kulon Progo. Visi Pembangunan Daerah:** “Membangun Kulon Progo dalam kebersamaan menuju penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, aman, sejahtera, dinamis berlandaskan iman dan taqwa.”

**Misi Pembangunan Daerah:** Berdasarkan visi tersebut yang didukung dengan keberhasilan etos kerja “tirta marga saras” pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya dan dengan semangat etos kerja yang baru “membangun desa menumbuhkan kota” maka misi pembangunan jangka menengah kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintah kepada rakyat/masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good govern-*

*ance*), (2) Meningkatkan profesionalisme dan jiwa *entrepreneur* aparatur, (3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa, (4) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, (5) Mengembangkan perekonomian rakyat terutama agribisnis dan pariwisata, (6) Memfasilitasi pengembangan dunia usaha dan investasi daerah, (7) Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keimanan, dan ketaqwaan, dan (8) Melestarikan budaya dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

**Kabupaten Gunung Kidul. Visi Pembangunan Daerah:** “Menjadi Pemerintah Daerah Yang Baik dan Bersih, *Responsive*, untuk Mendukung Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Kompetitif.”

**Misi Pembangunan Daerah:** (1) Mewujudkan referensi birokrasi: Meningkatkan kapasitas perangkat daerah, Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi; (2) Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat: Meningkatkan kualitas SDM masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan rakyat; (3) Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam wilayah yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kewilayahaan: Meningkatkan pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya alam, Mewujudkan keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan; (4) Mewujudkan pengembangan dunia usaha dan koperasi: Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah, Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan dunia usaha dan koperasi, Meningkatkan daya saing produk barang dan jasa.

Dari data-data pada tabel di atas juga terlihat bahwa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami ketimpangan antar-kabupaten, dimana ada kabupaten yang me-

miliki pendapatan relatif sangat tinggi seperti kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, serta terdapat kabupaten yang memiliki pendapatan sangat rendah, yaitu kabupaten Kulon Progo. Agar daerah-daerah yang lemah dapat mengejar ketertinggalannya, maka perlu dianalisis kabupaten mana di provinsi DIY tersebut yang berpotensi kuat dalam pengembangannya sehingga akan ada rembetan pertumbuhan bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya serta perlu dianalisis potensi apa yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola dan struktur perekonomian kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menganalisis kesesuaian antara visi dan misi kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan potensi masing-masing, untuk menganalisis ketimpangan antarkabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui kabupaten-kabupaten mana saja di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpotensi kuat untuk dikembangkan.

**Pertumbuhan Ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional perkapita riil naik dibarengi dengan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara terus menerus dan berjangka waktu yang panjang dan dapat dilihat dari lancarnya distribusi atas barang dan jasa (*Jhingan, 1999: 7*). Sedangkan menurut *Boediono (1985: 1)* pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari-

pada apa yang dicapai sebelumnya. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, harus memperhatikan kebijakan penggunaan sumberdaya agar terhindar dari penggunaan sumberdaya yang tidak tepat. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat (*Arsyad, 1999: 1*)

Menurut pandangan beberapa Ekonom Klasik, yakni *Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus*, dan *Jhon Stuart Mill* serta Ekonom Neoklasik, yaitu *Robert Solow* dan *Trevor Swan*, bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (*Sukirno, 1985: 275*).

Menurut *Kuznets*, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada. Terdapat enam karakteristik pertumbuhan ekonomi menurut *Kuznets*, yaitu: (*Todaro, 2004: 99-100*): (1) Tingkat perkembangan *output* perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, (2) Tingkat pertumbuhan produktivitas faktor yang tinggi, (3) Tingkat transformasi struktur ekonomi yang tinggi, (4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi

yang tinggi, (5) Adanya kecenderungan Negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk merambah bagian-bagian dunia lain sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku, dan (6) Berkurangnya kesenjangan pertumbuhan antara negara maju dengan negara-negara sedang berkembang.

Dari analisis pertumbuhan historis di negara-negara maju, *Kuznets* mengemukakan sebuah hipotesis bahwa pada tahap awal pertumbuhan, distribusi pendapatan cenderung memburuk, tetapi pada tahap berikutnya hal itu akan membaik. Observasi ini kemudian dikenal sebagai konsep kurva U terbalik *Kuznets* (*Todaro, 2004: 207*). Hipotesis *Kuznets* ini sejalan dengan Teori Kutub Pertumbuhan yang dipopulerkan oleh *Perrouk* (1970) yang menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah dalam waktu yang bersamaan. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda-beda.

Menurut *Arsyad (1999: 115-118)*, Teori Pertumbuhan Wilayah meliputi:

**Teori Ekonomi Neoklasik.** Teori Ekonomi Neoklasik memberikan dua konsep pokok dalam ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem ekonomi akan mencapai keseimbangan jika modal bisa mengalir tanpa restriksi. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah.

**Teori Basis Ekonomi.** Teori Basis Ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk angkatan kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan

menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja.

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang memiliki pasar baik secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

**Teori Lokasi.** Teori Lokasi menyatakan bahwa faktor lokasi mempengaruhi pertumbuhan daerah. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Banyak variabel yang mempengaruhi kualitas suatu lokasi, misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan, kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya serta sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut.

**Teori Tempat Sentral.** Teori Tempat Sentral menganggap bahwa terdapat hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang menyediakan sumber daya. Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori Tempat Sentral dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa, sedangkan lainnya

sebagai daerah pemukiman.

**Teori Kausasi Kumulatif.** Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya.

**Model Daya Tarik.** Teori Daya Tarik Industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

**Ketimpangan Pembangunan Antardaerah.** Ketimpangan pembangunan daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar. Fenomena yang dijelaskan oleh *Myrdal* sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif (*Cumulative Causation*). Menurut *Myrdal backwash effect* (dampak yang merugikan) lebih besar dibanding *spread effect* (dampak yang menguntungkan). Oleh karena itu, apabila tingkat pembangunan di berbagai daerah dibandingkan, maka pembangunan yang dicapai oleh daerah yang lebih maju selalu lebih cepat daripada yang terjadi pada daerah lain. Hal ini dalam jangka panjang akan menyebabkan tingkat ketimpangan yang cukup lebar (*Sukirno, 1985 : 24*).

Aliran Neoklasik menyatakan bahwa kesenjangan pertumbuhan antardaerah dapat terjadi karena tiga alasan, yaitu (*Armstrong and Taylor, 1993: 64*): (1) Kemajuan teknologi yang berbeda antardaerah, (2) Pertumbuhan persediaan modal (*capital stock*) yang berbeda antardaerah, (3) Pertumbuhan angkatan kerja (*labor force*) yang berbeda antardaerah.

*Williamson (1965)* meneliti hubungan

antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data perekonomian yang telah maju dengan perekonomian yang belum berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang secara signifikan (*Brojonegoro, 1999: 3*).

Pengertian wilayah daerah lebih terbuka dibanding dengan wilayah nasional, jika dilihat dari pergerakan sumberdaya antardaerah, dibandingkan dengan pergerakan sumberdaya antarnegara. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber, berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan penentu dalam laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertolak dari kenyataan tersebut, *Ardani (1992: 3)* mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap dalam pembangunan itu sendiri.

Menurut *Williamson (1999: 5-9)*, kesenjangan antardaerah yang semakin membesar disebabkan oleh *pertama*, adanya migrasi tenaga kerja antardaerah yang bersifat selektif, yang pada umumnya para migran tersebut lebih terdidik dan memiliki keterampilan yang tinggi dan masih produktif. *Kedua*, adanya migrasi kapital antardaerah, adanya aglomerasi pada daerah yang relatif kaya merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. *Ketiga*, adanya pembangunan sarana publik

pada daerah yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya ketimpangan antardaerah lebih besar. Keempat, kurangnya keterkaitan antardaerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya kesenjangan yang terjadi.

**Teori Pusat Pertumbuhan.** Teori pusat pertumbuhan menyatakan bahwa kumpulan industri cenderung memilih lokasi yang memusat di kota-kota besar (aglomerasi ekonomi) dan didukung oleh sebuah daerah pedalaman (*hinterland* yang kuat) (Wiyadi, 2003). Pendekatan dengan teori pusat pertumbuhan dengan maksud agar pertumbuhan suatu daerah dapat menimbulkan efek pertumbuhan bagi daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkaji hubungan timbal balik desa-kota. Dengan mengembangkan kota diharapkan agar perkembangan ini dapat menetes ke desa-desa melalui arus barang, bahan pangan, urbanisasi dan bahkan modal.

Menurut Myrdal (1999) potensi sumberdaya yang dimiliki antara satu dan daerah lainnya tidak merata. Oleh karena itu pertumbuhan antar daerah juga berbeda. Untuk dapat tumbuh secara cepat, suatu daerah perlu memilih satu atau lebih pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat. Apabila region ini kuat maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi region-region lemah.

## METODE

### Alat Analisis

**1. Analisis Indeks Williamson.** Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antarkabupaten yang terjadi di provinsi Daerah Isti-

mewa Yogyakarta tahun 1993-2003 dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional Inequality*) yang disebut sebagai Indeks Ketimpangan Williamson. Indeks ketimpangan regional ini semula digunakan oleh Jeffrey G. Williamson dengan rumus sebagai berikut: (Sjafrizal, 1997: 31)

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y) \sum f_i / n}{y}} \quad (1)$$

dimana;  $y_i$  adalah pendapatan perkapita di kabupaten  $i$ ,  $y$  adalah pendapatan perkapita rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  $f_i$  adalah jumlah penduduk di kabupaten  $i$ ,  $n$  adalah jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**2. Analisis Indeks Entropi Theil.** Dengan menggunakan alat analisis Indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsep Entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri (Kuncoro, 2004: 133). Adapun rumus dari indeks entropi Theil adalah sebagai berikut: (Ying, 2000)

$$I_{(y)} = \sum (y_j / y) x \log [(y_j / y) / (x_j / x)] \quad (2)$$

dimana;  $I(y)$  adalah Indeks Entropi Theil,  $y_j$  adalah PDRB perkapita kabupaten  $j$ ,  $y$  adalah rata-rata PDRB perkapita provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  $x_j$  adalah jumlah penduduk kabupaten  $j$ ,  $x$  adalah jumlah penduduk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**3. Analisis Gravitasi dan Model Interaksi Ruang.** Analisis ini digunakan untuk mencari wilayah mana yang berpotensi kuat dalam pertumbuhannya. Adanya interaksi antara kota-desa menunjukkan eratnya hubungan

antara daerah 1 dan daerah 2 sebagai konsekuensi interaksi kota-desa dalam teori pusat pertumbuhan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung interaksi dalam hubungan kota-desa adalah:

$$I_{1,2} = (W_1P_1)(W_2P_2)/J_{1,2}^2 \quad (3)$$

dimana;  $I_{1,2}$  adalah interaksi dalam wilayah 1 dan 2,  $W_1$  adalah pendapatan perkapita wilayah 1,  $W_2$  adalah pendapatan perkapita wilayah 2,  $P_1$  adalah jumlah penduduk wilayah 1,  $P_2$  adalah jumlah penduduk wilayah 2,  $J_{1,2}$  adalah jarak antara wilayah 1 dan wilayah 2 (dalam meter)

**4. Analisis Location Quotient (LQ).** Pendekatan LQ merupakan suatu teknik analisis yang dimaksudkan untuk menentukan potensi spesialisasi suatu daerah terhadap aktivitas ekonomi utama atau untuk menentukan sektor unggulan, yaitu sektor yang dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan daerah lain. Formulasi dari LQ adalah sebagai berikut.

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} \quad (4)$$

dimana;  $v_1$  adalah pendapatan sektor tertentu pada suatu daerah,  $v_2$  adalah total pendapatan daerah tersebut,  $V_1$  adalah pendapatan

sektor sejenis secara regional atau nasional,  $V_2$  adalah total pendapatan regional atau nasional

Berdasarkan formulasi di atas maka apabila  $LQ > 1$  berarti daerah mempunyai basis pada sektor tersebut dan ada kelebihan hasil yang dapat dipasarkan ke daerah lain;  $LQ = 1$  berarti daerah mempunyai hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan tersebut;  $LQ < 1$  berarti hasil sektor tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga perlu didatangkan dari daerah lain.

**5. Analisis Tipologi Daerah.** Untuk mengetahui posisi perekonomian masing-masing kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita digunakan analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tetapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high*

Tabel 5. Klasifikasi Kabupaten/Kota menurut Tipologi Klassen.

PDRB Perkapita (y)		y <sub>i</sub> > y		y <sub>i</sub> < y	
		Laju Pertumbuhan (r)			
r <sub>i</sub> > r		Daerah maju dan tumbuh cepat	Daerah berkembang Cepat		
r <sub>i</sub> < r		Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal		

Keterangan:  $y_i$  adalah pendapatan perkapita rata-rata wilayah kabupaten I,  $y$  adalah pendapatan perkapita rata-rata provinsi,  $r_i$  adalah laju pertumbuhan PDRB rata-rata wilayah kabupaten I,  $r$  adalah laju pertumbuhan PDRB rata-rata provinsi

*growth but low income*) dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafri-  
zal, 1997: 27-38).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis LQ

Untuk melihat potensi-potensi ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilakukan dengan analisis LQ. Meskipun dari hasil analisis ini dapat diketahui sektor-sektor unggulan daerah, tetapi dalam inferensi hasil analisis LQ seringkali terjadi kesalahan. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut adalah: (1) Pola selera dan pengeluaran (*MPC/Marginal Propensity to Consume*) rumah tangga memiliki tipe yang sama, sedangkan tingkat pendapatannya berbeda antardaerah, (2) Tingkat pendapatan rumah tangga berbeda antardaerah, dan (3) Produktivitas tenaga kerja dan bauran industri.

Sebagai contoh adalah sebagai berikut: (1) Untuk daerah-daerah yang berhawa dingin, meskipun  $LQ > 1$  untuk industri pertambangan minyak tetap akan mengimpor minyak karena kebutuhan akan bahan bakar untuk pemanas ruangan sangat tinggi, (2) Untuk daerah-daerah dengan tingkat upah rendah, meskipun  $LQ < 1$  untuk industri tetap akan mengekspor karena daya beli masyarakat rendah, (3) Untuk suatu daerah yang menjadi lokasi aglomerasi aktivitas ekonomi dan memiliki jumlah penduduk padat bisa jadi akan tetap mengimpor meskipun  $LQ > 1$ .

Adapun hasil perhitungan LQ kabupaten/kota di provinsi DIY disajikan dalam Lampiran *Tabel L 1*.

Berdasarkan hasil analisis nilai LQ dapat ditentukan sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis dan berpotensi untuk

dikembangkan. Adapun secara rinci hasil analisis masing-masing sektor untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

**Kota Yogyakarta.** Kota Yogyakarta memiliki empat sektor unggulan, karena terdapat empat sektor yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1. Adapun sektor unggulan tersebut adalah sektor listrik, gas dan air minum, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Artinya keempat sektor tersebut memiliki sumbangan yang lebih besar terhadap PDRB kota Yogyakarta dibandingkan sumbangan sektor yang sama terhadap PDRB provinsi DIY. Hal ini menunjukkan bahwa keempat sektor unggulan tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

**Kabupaten Sleman.** Kabupaten Sleman memiliki empat sektor unggulan, karena terdapat empat sektor yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1. Adapun sektor unggulan tersebut adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Artinya keempat sektor tersebut memiliki sumbangan yang lebih besar terhadap PDRB kabupaten Sleman dibandingkan sumbangan sektor yang sama terhadap PDRB provinsi DIY. Hal ini menunjukkan bahwa keempat sektor unggulan tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

**Kabupaten Bantul.** Kabupaten Bantul memiliki lima sektor unggulan, karena terdapat lima sektor yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1. Adapun sektor unggulan tersebut adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Artinya kelima sektor tersebut memiliki sumbangan yang lebih besar terhadap PDRB kabupaten Bantul dibandingkan sumbangan sektor yang sama terhadap PDRB provinsi DIY. Hal ini menunjukkan bahwa

kelima sektor unggulan tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

**Kabupaten Kulon Progo.** Kabupaten Kulon Progo memiliki lima sektor unggulan, karena terdapat lima sektor yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1. Adapun sektor unggulan tersebut adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Artinya kelima sektor tersebut memiliki sumbangan yang lebih besar terhadap PDRB kabupaten Kulon Progo dibandingkan sumbangan sektor yang sama terhadap PDRB provinsi DIY. Hal ini menunjukkan bahwa kelima sektor unggulan tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

**Kabupaten Gunung Kidul.** Kabupaten Gunung Kidul memiliki empat sektor unggulan, karena terdapat empat sektor yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1. Adapun sektor unggulan tersebut adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Artinya keempat sektor tersebut memiliki sumbangan yang lebih besar terhadap PDRB kabupaten Gunung Kidul dibandingkan sumbangan sektor yang sama terhadap PDRB provinsi DIY. Hal ini menunjukkan bahwa keempat sektor unggulan tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

Dari hasil perhitungan LQ masing-masing kabupaten/kota (hasil perhitungan di lampiran) terlihat bahwa di kota Yogyakarta dan kabupaten Kulon Progo terjadi perubahan Struktural. Mulai tahun 2000 lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor unggulan. Hal ini mungkin disebabkan oleh semakin berkembangnya kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, sehingga semakin banyak mahasiswa datang ke kota Yogyakarta yang memiliki kebutuhan akan barang dan jasa, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan jalur distribusi barang dan jasa, yaitu melalui lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, sehingga sektor ini cukup berkembang di kota Yogyakarta dan akhirnya sektor yang berpotensi untuk dikembangkan karena mulai tahun 2000 memiliki nilai  $LQ > 1$ .

Untuk kabupaten Kulon Progo yang terjadi justru sebaliknya. Sebelum tahun 1999 lapangan usaha bangunan merupakan sektor unggulan, tetapi mulai tahun 1999 nilai LQ lapangan usaha ini mengalami penurunan menjadi kurang dari 1 sehingga bukan lagi menjadi sektor unggulan di kabupaten Kulon Progo. Hal ini kemungkinan merupakan dampak dari krisis ekonomi sehingga mulai tahun 1999, aktivitas pembangunan fisik menurun.

Kota Yogyakarta memiliki visi untuk menjadikan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat *Mangayu Hayuning Bawana*. Visi tersebut sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki kota Yogyakarta yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa, sehingga besar kemungkinan kota Yogyakarta dapat mencapai visi yang telah ditetapkannya.

Kabupaten Sleman memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya, sedangkan potensi unggulan yang dimiliki adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Terlihat bahwa tidak ada keterkaitan antara visi dan potensi, karena indikator capaian

visi kabupaten Sleman tersebut tidak jelas.

Mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan daerah adalah visi kabupaten Bantul, sedangkan salah satu misinya adalah mendukung peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor kesehatan, pendidikan, perdagangan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah di kabupaten Bantul. Terdapat kesesuaian antara visi dan misi kabupaten Bantul tersebut dengan potensi unggulan daerahnya, yakni sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa, sehingga visi kabupaten Bantul tersebut kemungkinan akan dapat dicapai.

Beberapa misi kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan untuk mencapai visi membangun Kulon Progo dalam kebersamaan menuju penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, aman, sejahtera, dinamis berlandaskan iman dan taqwa adalah mengembangkan perekonomian rakyat terutama agribisnis dan pariwisata serta memfasilitasi pengembangan dunia usaha dan investasi daerah. Karena misi tersebut didukung oleh potensi unggulan daerah, yakni sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi, maka diharapkan pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo dapat mencapai visinya.

Kabupaten Gunung Kidul memiliki visi menjadi pemerintah yang baik, bersih dan responsiv untuk mendukung terwujudnya masyarakat mandiri dan kompetitif. Terlihat bahwa visi tersebut dan juga misi seperti yang tersebut di atas tidak jelas serta tidak didukung dengan potensi unggulan daerahnya, karena potensi unggulan Gunung Kidul adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, serta

sektor pengangkutan dan komunikasi.

## Analisis Tipologi Daerah

Analisis Tipologi Daerah digunakan untuk mengetahui posisi perekonomian masing-masing kabupaten di provinsi DIY, ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapitanya. Menurut Tipologi Daerah, daerah dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: **daerah cepat maju dan cepat tumbuh** (*high growth and high income*), **daerah maju tetapi tertekan** (*high income but low growth*), **daerah berkembang cepat** (*high growth but low income*) dan **daerah relatif tertinggal** (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997: 27-38). Adapun kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikannya adalah sebagai berikut: (1) Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi DIY, (2) Daerah maju tetapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan provinsi DIY, (3) Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan provinsi DIY, (4) Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan provinsi DIY. Hasil analisis tipologi daerah kabupaten/ kota di provinsi DIY disajikan pada Lampiran Gambar L1.

**Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh.** Kota Yogyakarta sebagai daerah yang berada pada klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi DIY. Pada periode tahun 1993-2003,

rata-rata tingkat pertumbuhannya sebesar 4,05 persen dan tingkat pendapatan perkapita sebesar Rp.3.545.057,00. Sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi DIY adalah 2,15 persen sementara tingkat pendapatan perkapita Rp.1.733.746,00.

**Daerah Maju Tetapi Tertekan.** Tidak ada satu kabupaten pun yang termasuk dalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan ini.

**Daerah Berkembang Cepat.** Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul sebagai daerah yang berada pada klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tetapi rata-rata pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi DIY. Pada periode tahun 1993-2003, Sleman memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,38 persen dan tingkat pendapatan perkapita sebesar Rp.1.616.823,00. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Gunung Kidul sebesar 2,56 persen dan tingkat pendapatan perkapita Rp.1.355.608,00.

**Daerah Relatif Tertinggal.** Kabupaten Bantul dan Kulon Progo sebagai daerah yang berada pada klasifikasi daerah relatif memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi DIY. Pada periode tahun 1993-2003, Kulon Progo memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar -0,20 persen dan tingkat pendapatan perkapita sebesar Rp.1.053.440,00. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Bantul sebesar 1,92 persen dan tingkat pendapatan perkapita Rp.1.097.800,00.

## Indeks Gravitasi

Analisis Gravitasi dan model interaksi ruang digunakan untuk mengetahui wilayah mana yang berpotensi kuat dalam pengembangannya. Dengan penentuan pusat pertumbuhan

yang tepat, yakni wilayah dengan potensi paling kuat, diharapkan akan terjadi pemerataan pertumbuhan bagi daerah-daerah di sekitarnya serta terjadi percepatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk provinsi DIY, pusat pertumbuhan adalah kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi, di samping karena kota Yogyakarta termasuk dalam klasifikasi daerah cepat tumbuh dan cepat berkembang. Agar terjadi percepatan pertumbuhan maka perlu dibangun suatu pusat pertumbuhan baru, yaitu wilayah yang memiliki potensi paling kuat. Adapun hasil analisis gravitasi dan model interaksi ruang untuk provinsi DIY tampak pada Lampiran Tabel L2.

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa interaksi paling kuat terjadi antara kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, karena interaksi kedua wilayah tersebut memiliki rata-rata nilai indeks gravitasi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah kota Yogyakarta sebagai pusat kota dan Sleman sebagai desa atau kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan Sleman sebagai daerah penyangga/daerah pemukiman.

## Analisis Ketimpangan Antardaerah

Adanya heterogenitas dan beragamnya karakteristik suatu wilayah menyebabkan adanya kecenderungan terjadi ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Besar kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antarkabupaten/kota memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota yang terjadi di Provinsi DIY selama tahun 1993-2003 dianalisis dengan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. Angka, baik Indeks Williamson

dan Indeks Entropi Theil, yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau dengan kata lain makin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin lebar. Meskipun kedua indeks sama-sama mengukur masalah ketimpangan, tetapi Indeks Entropi Theil memiliki kelebihan dibanding Indeks Williamson karena indeks ini memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu, juga menyediakan ukuran ketimpangan secara rinci dalam sub-unit geografis yang lebih kecil. Hal ini akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode waktu tertentu dan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial. (Kuncoro, 2004: 134). Hasil perhitungan Indeks Williamson dan Grafiknya disajikan dalam Lampiran Tabel L3 dan Gambar L2.

Dilihat dari hasil perhitungan dan grafik Indeks Williamson serta Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa ketimpangan antarkabupaten/kota di provinsi DIY selama tahun 1993-2003 cenderung meningkat. Nilai Indeks Williamson pada tahun 1993 sebesar 0,36 yang naik menjadi 0,57 pada tahun 2003 dengan rata-rata selama pengamatan 0,483. Nilai Indeks Entropi Theil juga menunjukkan hal yang sama, bahwa terjadi kenaikan ketimpangan di provinsi DIY selama tahun 1993-2003 (Lampiran Tabel L4 dan Gambar L3). Tahun 1993 nilai indeks Entropi Theil adalah 0,027 sedangkan tahun 2003 sebesar 0,172 dengan nilai rata-rata 0,112. Pada tahun 1998, indeks ketimpangan provinsi DIY cenderung turun dari tahun 1997 yang sebesar 0,53 menjadi 0,47, tetapi pada tahun 1999 meningkat lagi menjadi 0,48. Penurunan ketimpangan pada tahun 1998 ini disebabkan oleh krisis yang menimpa Indonesia, di mana provinsi DIY juga merasakan imbasnya. Daerah yang terkena dampak krisis umumnya

adalah daerah perkotaan sedangkan daerah non perkotaan tidak terkena dampak krisis sebesar daerah perkotaan sehingga menyebabkan penurunan ketimpangan pada tahun 1998.

Kenaikan ketimpangan di provinsi DIY selama periode tahun 1993-2003 ini juga dapat dilihat dari rasio pendapatan perkapita tertinggi dan pendapatan perkapita terendah seperti tampak dalam Lampiran Tabel L5.

Jika dilihat dari tabel rasio tersebut, terlihat bahwa kesenjangan pendapatan perkapita di provinsi DIY pada periode 1993-2003 selalu meningkat, bahkan meskipun berdasarkan nilai indeks Williamson dan Indeks Theil pada tahun 1998 mengalami penurunan, tetapi rasio pendapatan tertinggi-terendah tidak menunjukkan hal serupa. Hal ini disebabkan kabupaten Kulon Progo mengalami keterpurukan ekonomi pascakrisis ekonomi dan waktu yang dibutuhkan dalam proses *recovery* sangat lama.

## KESIMPULAN

Dari seluruh hasil analisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal seperti tersebut di bawah ini:

- (1) Masalah fundamental yang dihadapi oleh pemerintah provinsi DIY adalah kemiskinan dan ketimpangan, di mana ada kecenderungan bahwa ketimpangan ini meningkat sepanjang waktu. Ada daerah yang relatif sangat kaya (kota Yogyakarta) dan ada daerah yang relatif miskin (kabupaten Kulon Progo). Peningkatan ketimpangan ini disebabkan oleh pola pembangunan yang berbeda antardaerah. Beberapa daerah di provinsi DIY memiliki visi yang tidak jelas, baik indikator maupun waktu pencapaiannya, di samping seringkali visi daerah tersebut tidak

didukung oleh potensi yang dimiliki oleh daerah,

(2) Untuk melihat potensi unggulan yang dimiliki masing-masing daerah dilakukan analisis dengan menggunakan analisis LQ (*Location Quotient*).

(3) Berdasarkan tipologi daerah, kabupaten/kota di provinsi DIY dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kota Yogyakarta masuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Sleman dan Gunung Kidul termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat sedangkan yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal adalah Bantul dan Kulon Progo,

(4) Dari hasil analisis Indeks Williamson dan Indeks Enthropi Theil, keduanya menunjukkan trend yang sama, yaitu bahwa di provinsi DIY terjadi kecenderungan kenaikan ketimpangan, meskipun hasil perhitungan kedua indeks tersebut juga sama-sama menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan pada tahun 1998, tetapi mulai tahun 1999 ketimpangan ini kemudian meningkat terus. Penurunan ketimpangan pada tahun 1998 ini diakibatkan oleh dampak krisis yang lebih berimbas di daerah perkotaan sehingga ketimpangan menurun,

(5) Hasil perhitungan rasio pendapatan perkapita tertinggi dan terendah antardaerah di provinsi DIY menunjukkan tren peningkatan. Bahkan ketika pada tahun 1998, berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Theil terjadi penurunan ketimpangan, rasio pendapatan perkapita ini terus meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kelompok masyarakat yang justru diuntungkan dengan adanya krisis, misalnya karena keuntungan dari jual beli dolar atau peningkatan ekspor akibat depresiasi rupiah, sementara sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat krisis ekonomi yang terjadi. Hal inilah yang me-

nyebabkan terjadinya peningkatan rasio pendapatan perkapita di provinsi DIY.

Dari kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

(1) Dalam penyusunan visi dan misi daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan kesesuaian antara visi/misi dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, juga harus terjadi sinkronisasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Di samping itu, dalam penyusunan visi/misi, pemerintah daerah harus jelas dalam menetapkan indikator dan waktu pencapaiannya. Hal ini sangat penting mengingat visi suatu daerah merupakan pedoman implementasi pembangunan daerah.

(2) Untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

**Bagi pemerintah daerah provinsi DIY:** memberikan bantuan bagi daerah termiskin berupa pembiayaan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (menciptakan *human capital*), karena peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan melalui peningkatan penyerapan ide dan inovasi teknologi serta kewirausahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa antara lain pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sarana pelayanan kesehatan dan perbaikan gisi,

**Bagi pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo (daerah termiskin):** dengan meningkatkan sarana transportasi, terutama transportasi antarkabupaten/kota lain di provinsi DIY untuk memperlancar arus distribusi/perdagangan barang dan jasa, karena dengan perdagangan perekonomian daerah tertinggal dapat "*catch up*" perekonomian daerah yang relatif lebih maju/berkembang. Selain itu, pemerintah daerah juga harus lebih mem-

buka diri terhadap investor, karena hanya dengan investasi kegiatan pembangunan dapat berjalan, di samping investasi dapat memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah sehingga akan terjadi peningkatan tingkat kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo harus dapat meningkatkan promosi daerahnya untuk dapat menarik investor masuk. Atau dengan kata lain, pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo harus mampu menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga kondusif bagi pertumbuhan bisnis, perkembangan investasi dan berdaya saing tinggi agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

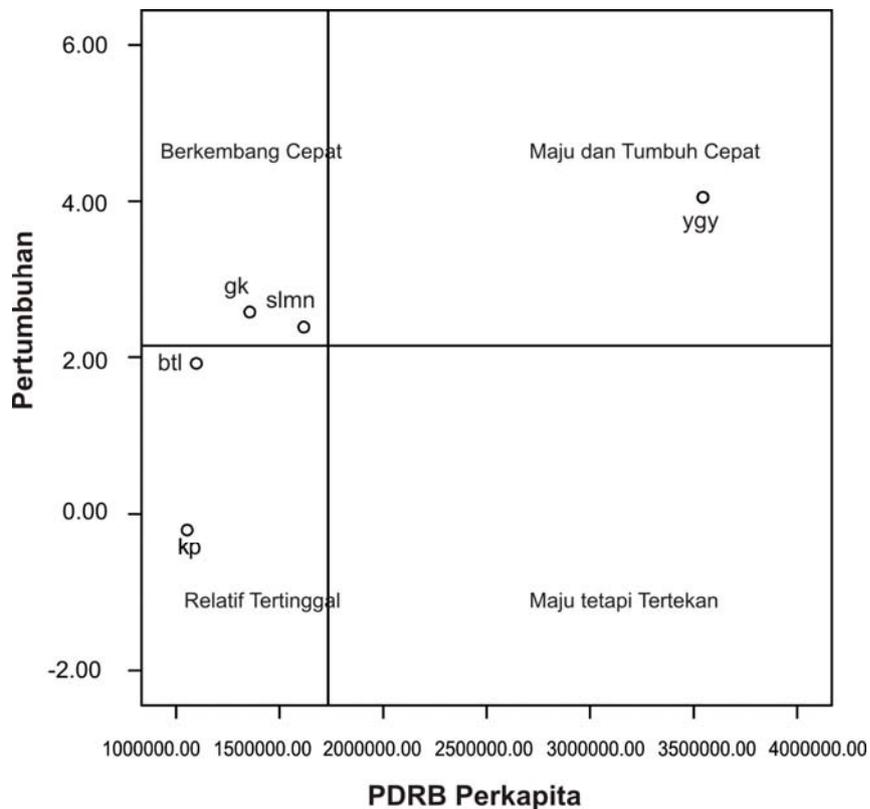
## DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Amirudin. 1992. "Analysis of Region Growth and Disparity: the Impact Analysis of the Project on Indonesian Development", *Ph.D. Dissertation City and Regional Planning, University of Pennsylvania Philadelphia, USA* (tidak dipublikasikan).
- Armstrong, H and Jim Taylor. 1993. *Regional Economics and Policy*. 2<sup>nd</sup> Edition. London: Harvester Wheatsheaf.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jogjakarta: BPFE.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- Brojonegoro, Bambang, P.S. 1999. The Impact or Current Asean Economic Crisis to Regional Development Pattern in Indonesia, *paper*, Jakarta: LPKM- FEUI.
- Hendriawan, Basuki. Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 1995-2005. *Thesis, UGM Pascasarjana, tidak dipublikasikan*.
- Jhingan, M. L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan)*, Edisi Ketujuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Analisis Spasial dan Regional*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*, Jakarta: Penerbit Airlangga..
- Sjafrizal. 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat", *Prisma, LP3ES, Nomor 3*, 27-38.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LPFE UI.
- Todaro, Michael, P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (terjemahan)*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Erlangga.
- Wiyadi, dan Rina Trisnawati. Analisis Potensi Daerah untuk Mengembangkan Wilayah di Eks-Karesidenan Surakarta dengan Menggunakan Teori Pusat Pertumbuhan. *Fokus Ekonomi Vol.1. No.3 Desember 2003*, 284-292.
- Ying, Long, G. 2000. "China's Changing Regional Disparities during the reform Period", *Economic Geography, Vol. XXIV No. 7*. 59-70.

## LAMPIRAN

**Tabel L1. Nilai Rata-rata LQ Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 1993-2003**

Lapangan Usaha	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Bantul	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Gunung Kidul
Pertanian	0.048	0.727	1.094	1.470	1.821
Pertambangan dan Penggalian	0.026	0.568	1.419	1.443	1.949
Industri Pengolahan	0.653	1.009	0.885	0.314	0.736
Listrik, gas dan air minum	1.846	0.944	0.676	0.677	0.319
Bangunan	0.856	1.410	1.360	1.028	1.129
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.966	0.895	0.832	0.735	0.541
Pengangkutan dan Komunikasi	1.808	1.292	1.087	1.303	1.223
Keuangan, sewa dan jasa perusahaan	1.836	1.357	0.720	0.769	0.469
Jasa-jasa	1.709	0.952	1.117	1.317	0.897



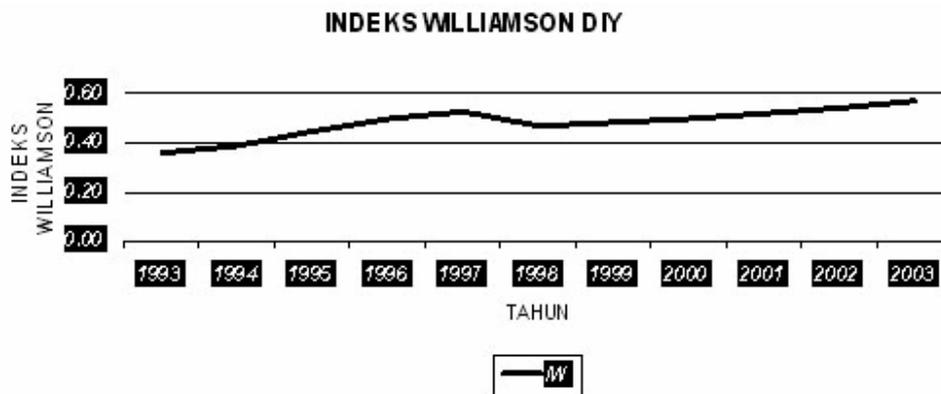
**Gambar L1. Tipologi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 1993-2003**

**Tabel L2. Indeks Gravitasi dan Model Interaksi Ruang Provinsi DIY tahun 1993-2003**

Tahun	Yogya-Sleman	Yogya-Bantul	Yogya-Kln Progo	Yogya-Gn Kidul
1993	107.162	79.891	6.726	5.342
1994	125.331	93.035	7.424	6.193
1995	150.044	110.436	8.343	7.350
1996	176.850	128.315	9.551	8.561
1997	191.826	138.484	10.263	9.306
1998	156.332	111.662	7.847	7.672
1999	161.041	114.337	7.133	7.886
2000	172.866	122.053	7.533	8.393
2001	185.526	129.859	7.944	8.851
2002	201.051	139.278	8.423	9.331
2003	219.100	151.207	9.050	9.904
Rerata	167.921	119.869	8.203	8.072

**Tabel L3. Indeks Williamson Provinsi DIY Tahun 1993-2003**

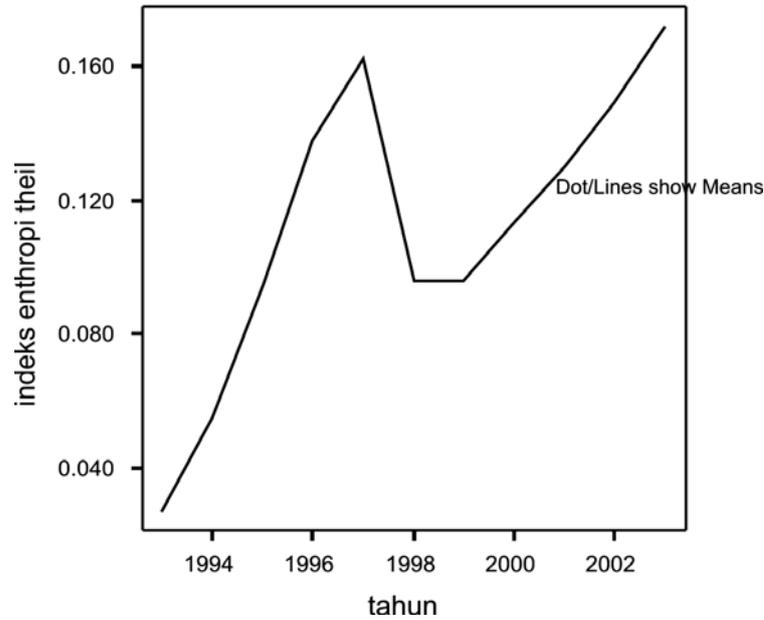
Tahun	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Rerata
IW	0,36	0,39	0,45	0,50	0,53	0,47	0,48	0,50	0,52	0,54	0,57	0,483



**Gambar L2. Grafik Indeks Williamson Provinsi DIY tahun 1993-2003**

**Tabel L4. Indeks Enthropi Theil Provinsi DIY Tahun 1993-2003**

Tahun	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	rerata
Theil	0,027	0,055	0,095	0,138	0,162	0,096	0,096	0,113	0,130	0,149	0,172	0,112



Gambar L3. Grafik Indeks Theil Provinsi DIY tahun 1993-2003

Tabel L5. Rasio Pendapatan Perkapita tertinggi-terendah Provinsi DIY tahun 1993-2003

Tahun	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Rasio	2,86	2,90	3,04	3,15	3,25	3,32	3,75	3,82	3,87	3,92	3,96

Tabel L6. Sektor Unggulan Masing-masing Daerah

Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan
Yogyakarta	Sektor listrik, gas dan air minum, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa
Sleman	Sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.
Bantul	Sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.
Kulon Progo	Sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.
Gunung Kidul	Sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi